

PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Baubau)

Windra Ulwia Rehat^{*1}, Nining Asniar Ridzal²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: windrabaubau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 (empat orang Pegawai bagian keuangan yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Baubau dan yang menjadi sampel yaitu 4 (empat) orang Pegawai Dinas Perhubungan Kota Baubau bagian keuangan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di peroleh kesimpulan: 1) Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan basis akrual. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas. 2) Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerja sama dengan komisi 1 DPRD. Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan *output*. 3) Akuntabilitas kinerja pada dinas perhubungan kota baubau saat ini cukup baik yang meliputi: Tujuan dan sasaran yang dicapai, Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Job Description* dalam mendukung SOP Satuan Kerja, dan Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan public.

Kata kunci: Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of public sector accounting reporting standards and supervision of the quality of financial reports on performance accountability at the Baubau City Transportation Office. Methods The research uses descriptive qualitative methods. The population in this study is 4 employees of the finance department at the Baubau City Transportation Office. and the sample is 4 (four) employees of the Baubau City Transportation Office in the financial section. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Based on the results of research and data analysis, conclusions are obtained: 1) The application of Public Sector Accounting Reporting Standards at the Transportation Agency of Baubau City uses an accrual basis. In the event that the laws and regulations require the presentation of financial statements on a cash basis. 2) The

system for controlling the quality of financial reports at the Baubau City Transportation Service, namely the functional supervision of the Inspectorate in collaboration with Commission 1 of the DPRD. In addition, the supervisory function in the field of regional financial administration is to improve the quality of financial reports. The Baubau City Transportation Office uses the Regional Management Information System (SIMDA) which helps the Baubau City Transportation Office in compiling financial reports from the input process stage to the output stage. 3) Performance accountability at the Baubau City Transportation Service is currently quite good which includes: Goals and targets achieved, Government Agency Performance Accountability Reporting System, Job Description in support of Work Unit SOPs, and Bureaucratic Structure driven by the service's vision and mission in creating a climate conducive to the implementation of performance effectiveness in the provision of public services.

Keywords: *Public Sector Accounting Reporting Standards, Supervision, Performance Accountability.*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan *complicated*, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa "sangat sederhana". Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan

oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan dapat dikatakan gagal.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil pemeriksaan SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada semester 1 Tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan pada tahun 2018 pasal 537 LKPD Tahun 2018 dari 542 pemda yang wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (IHPS I, 2018:79). Penyebab LKPD memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun asset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen asset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (IHPS I, 2018).

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, Pamungkas (2012).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi

pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Suwanda (2015) standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Halim dan Iqbal, (2012): “Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang pegawai bagian keuangan yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Baubau. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang Pegawai Dinas Perhubungan Kota Baubau bagian keuangan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kota Baubau

Dinas Perhubungan Kota Baubau menerapkan Akuntansi Berbasis Kas. Akuntansi Berbasis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan dan pendapatan maupun belanja dan pembiayaan. Dinas Perhubungan Kota Baubau saat ini menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berdasarkan aturan yang ditetapkan. Pada saat dikeluarkannya peraturan ini, Dinas Perhubungan Kota Baubau sudah sangat siap untuk menerapkan peraturan tersebut dan juga didukung dengan latar belakang yang baik dibidang keuangan sehingga memudahkan pemahaman didalam menyusun pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Proses penerapan PP No. 71 tahun 2010 ini sendiri diawali dengan Pemerintah Kota Buabau membuat regulasi di daerah dan setelah regulasi di daerah ditetapkan baru disosialisasikan.

Berdasarkan pengamatan struktur komponen Laporan Keuangan yang disusun dan dibentuk Dinas Perhubungan Kota Baubau tahun 2020 apabila dilakukan perbandingan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 71 Tahun 2010, tidak banyak perbedaan. Dinas Dinas Perhubungan Kota Baubau tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Dinas Perhubungan Kota Baubau, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran sebagaimana pencatatanya dilakukan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

Tabel 1. Perbandingan Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP Nomor 71 Tahun 2010

No.	Indikator	SAP 71/2010 Basis Akrual	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Baubau	Perbandingan SAP 71/2010 dengan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Baubau
1.	Struktur Penyajian Komponen Dalam Laporan keuangan	PSAP 01 p 14: Penyajian komponen dalam laporan keungan meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas;	Komponen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Baubau yang dibentuk dalam pelaporan terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Operasional; dan	Tidak menyajikan 3 (tiga) komponen dalam Laporan Keuangan yaitu: a) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; b) Laporan Arus Kas; dan c) Catatan atas Laporan Keuangan.

		f) Laporan Perubahan Ekuitas; g) Catatan atas Laporan Keuangan.	d) Laporan Perubahan Ekuitas.	
2.	Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 01 p 61-62: Unsur yang terkandung dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup, a) Pendapatan-LRA; b) Transfer; c) Belanja; d) Sisa Lebih/kurang Pembiayaan; dan e) Defisit Pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran dapat membandingkan sumber daya yang dikelola oleh entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait antara perbandingan anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan akuntansi.	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan: a) Pendapatan; b) Transfer; c) Belanja; d) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan; dan e) Defisit Pembiayaan.	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Realisasi Anggaran telah menyusun secara lengkap terkait pos-pos pendapatan, transfer, belanja, sisa lebih/kurang pembiayaan dan defisit pembiayaan.
3.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	PSAP 01 p 41: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/kurang Pembiayaan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih Aktif.	Tidak Ada	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Keuangannya tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
4.	Neraca	PSAP 01 p 45-46: Neraca pada entitas pelaporan mewajibkan mengklarifikasikan asetnya berupa, Aset Lancar dan Aset Non-	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Neraca SKPD menyajikan setiap unit komponen pos-pos	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Neraca SKPD telah menyusun secara lengkap terkait pos-

		Lancar, mengklarifikasikan kewajiban berupa Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang dalam Neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang meliputi jumlah yang diharapkan akan didapat atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan didapat atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan.	dalam, Aset dan Kewajiban yang mencangkup jumlah-jumlah yang akan diperoleh atau diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal dalam pelaporan dan dari jumlah yang diharapkan akan diterima dan diperoleh dalam waktu 12 bulan.	pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas secara Lengkap.
5.	Laporan Operasional	PSAP 01 p 78-79: Laporan Operasional menyajikan ikhtisar pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO; b) Beban; c) Transfer; dan d) Komponen Pos Luar Biasa.	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Operasional telah menyajikan sekurang kurangnya pos-pos: a) Pendapatan-LO; b) Beban dari aktifitas Operasional; c) Defisit dari kegiatan Non Operasional; d) Pos Luar Biasa; e) Suplus/defisit-LO.	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Operasional telah menyajikan secara lengkap terkait pos-pos yang berkaitan dengan aktifitas operasionalnya.
6.	Laporan Arus Kas	PSAP 01 p 80-81: Laporan Arus Kas dalam penyajiannya berhubungan dengan aktifitas Investasi, Pendanaan dan Operasional terkait penerimaan Kas dan pengeluaran Kas yang Transitory	Tidak ada	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Keuangannya tidak melakukan penyusunan Laporan Arus Kas.
7.	Laporan Perubahan	PSAP 01 p 101-102: Laporan Perubahan	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam

	Ekuitas	Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya po-pos sebagai berikut: a) Ekuitas Awal; b) Suplus/defisit-LO; c) Koreksi-koreksi Kebijakan Akuntansi; d) Ekuitas Akhir.	Laporan Ekuitasnya telah menyajikan komponen pos: a) Ekuitas Awal; b) Suplus/defisit LO; c) Koreksi Kesalahan; d) Ekuitas Akhir.	Laporan Perubahan Ekuitas dalam pos-pos dan penyajian telah menyajikan secara lengkap komponen dalam Laporan Ekuitas.
8.	Catatan Atas Laporan Keuangan	PSAP 01 p 49: Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan sebagai berikut: a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Menyajikan informasi terkait kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. b) Menyajikan Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. c) Menyajikan informasi menyangkut dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. d) Menyajikan rincian dan penjelasan terkait masing-masing komponen	Tidak Ada	Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam Laporan Keuangannya tidak melakukan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

		pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan. e) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar depan laporan keuangan. f) Menyajikan informasi lainya yang diperlukan untuk penyajian wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.		
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah peneliti, 2021

4.2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau

Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan setiap Pemerintah Daerah tidak terlepas dari Kordinasi badan legislasi yang memiliki fungsi pengawasan juga terhadap setiap kinerja dari pemerintah itu sendiri. DPRD Kota Baubau adalah badan legislasi daerah untuk kota Baubau yang apabila dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Kota Baubau seyogyanya dapat menjalin hubungan kordinasi untuk menciptakan suatu pemerintahan dalam ruang lingkup daerah pada khususnya yang lebih baik.

Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan *output*. Adapun *Input* dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan yaitu berupa jurnal (*input*) yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan dan adapun (*output*) yang dihasilkan yaitu berupa RKA (rencana kerja anggaran), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (surat penyedia dana). Data ini diolah secara

otomatis oleh sistem, pekerjaan jadi mudah karena hanya menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang di inginkan.

4.3. Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau

1. Tujuan dan Sasaran yang Dicapai

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan di Dinas Perhubungan Kota Baubau sering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SAKIP, dan pemerintah daerah melalui pimpinan dinas senantiasa mengadakan sosialisasi kepada publik tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan yaitu dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dimana secara konsepsi implementasinya sangat didukung adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang ingin dicapai.

2. Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan tercapainya efektivitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas yang menjadi tanggungjawab dinas, dimana secara konsepsi pelaksanaannya sangat didukung adanya beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dalam melaksanakan kebijakan tentang SAKIP seperti Petunjuk atau Pedoman teknis berupa Peraturan Daerah dan pedoman/acuan berupa pedoman teknis yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Baubau. Kemudian kepada aparat instansi dinas diberikan

pemahaman dan keterampilan kepada aparat sampai mahir dalam penggunaan sistem laporan tersebut.

3. Job Description dalam mendukung SOP Satuan Kerja

Dinas Perhubungan Kota Baubau sudah memiliki kebijakan teknis yang dikeluarkan Dinas yang menjadi pedoman atau petunjuk teknis tentang Uraian Tugas (*Job Discriptions*) dalam mendukung Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja para Pegawai di Dinas Perhubungan; dan aktivitas pegawai pada dinas Perhubungan dalam melaksanakan Uraian Tugas (*Job Discription*) agar sesuai dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat pun sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

4. Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakn iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan publik.

Struktur birokrasi jabatan pada dinas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 adalah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara model *Span of control* atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Struktur birokrasi yang diterapkan agar kinerja dinas dapat dipertanggungjawabkan melalui Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu struktur dengan prinsip Miskin Struktur tapi Kaya fungsi artinya struktur yang ramping tapi fungsinya luas.

4.4.Pembahasan

Dinas Perhubungan Kota Baubau menerapkan Akuntansi Berbasis Kas. Laporan Keuangan yang disusun dan dibentuk Dinas Perhubungan Kota Baubau tahun 2020 apabila dilakukan perbandingan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 71 Tahun 2010, tidak banyak perbedaan. Dinas Perhubungan Kota Baubau tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam PSAP PP 71 Tahun 2010 paragraf 1 angka 8, Standar Akuntansi Pemerintahan, Komponen Laporan Keuangan yang dapat dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Olga Yani Fransiska Singkali (2014) yang mengemukakan bahwa evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerja sama dengan komisi 1 DPRD. Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan *output*.

Menurut Pedansa (2013) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi: “Pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindatanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenangan oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti

dengan pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan”.

Sedangkan kualitas laporan keuangan menurut Bastian (2013) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”. Sementara menurut Mahmudi (2013) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau meliputi:

- 1) Tujuan dan Sasaran yang capai, pimpinan di Dinas Perhubungan Kota Baubau sering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SAKIP, dan pemerintah daerah melalui pimpinan dinas senantiasa mengadakan sosialisasi kepada publik tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir.
- 2) Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tercapainya efektivitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas yang menjadi tanggungjawab dinas, yang secara konsepsi pelaksanaannya sangat didukung adanya beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dalam melaksanakan kebijakan tentang SAKIP, seperti Petunjuk atau Pedoman teknis berupa Peraturan Daerah dan pedoman/acuan berupa pedoman teknis yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014.
- 3) *Job Description* dalam mendukung SOP Satuan Kerja, Uraian Tugas (*Job Discription*) agar sesuai dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat pun sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- 4) Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan publik, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi antara lain model *Span of control* atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Struktur birokrasi yang diterapkan agar kinerja dinas dapat dipertanggungjawabkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu struktur dengan prinsip Miskin Struktur tapi Kaya fungsi artinya struktur yang ramping tapi fungsinya luas.

Berdasarkan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiwik Andriani, Irda Rosita dan Hidayatul Ihsan (2015) yang mengemukakan bahwa LAKIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan adanya Lakip ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. LAKIP merupakan media akuntabilitas setiap organisasi yang dapat mendukung terciptanya *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan basis akrual. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas.
- 2) Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerja sama dengan komisi 1 DPRD. Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan *output*.
- 3) Akuntabilitas kinerja pada dinas perhubungan kota baubau saat ini cukup baik yang meliputi:
 - a) Tujuan dan sasaran yang dicapai, pimpinan di Dinas Perhubungan Kota Baubau sering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SAKIP, dan pemerintah daerah melalui pimpinan dinas senantiasa mengadakan sosialisasi kepada publik tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir.
 - b) Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tercapainya efektivitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas yang menjadi tanggungjawab dinas, yang secara konsepsi pelaksanaannya sangat didukung adanya beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dalam melaksanakan kebijakan tentang SAKIP, seperti Petunjuk atau Pedoman teknis berupa Peraturan Daerah dan pedoman/acuan berupa pedoman teknis yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014.
 - c) *Job Description* dalam mendukung SOP Satuan Kerja, Uraian Tugas (*Job Discription*) agar sesuai dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat pun sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- d) Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan publik, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi antara lain model *Span of control* atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintah.

6. SARAN

- 1) Bagi Instansi, diharapkan sebagai entitas pelaporan dalam melaporkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan sebaiknya menyajikan seluruh laporan keuangan sebagai entitas pemerintah sebagai sarana pertanggungjawaban publik dan terciptanya pemerintahan yang baik dan menunjuk tim penyusun dan penyajian laporan realisasi anggaran serta menunjuk orang yang mengerti akuntansi dan memahami teknologi untuk menunjang penyajian laporan dengan berbasis sistem keuangan pemerintahan untuk mengurangi salah saji yang mungkin terjadi
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam lagi dalam penelitian tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, dan lebih baik lagi dengan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual. *Jurnal STIE Semarang*, 3(3).
- Agus Setiawan, dan Sutjipto Ngumar. 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penggajian pada PT. Sarana Utama Surabaya*.vol 2. No 3
- Agusta dan Sutanto. 2013. *Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Haragon Surabaya*. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol 1 (3), p. 1-9

- Agustina, M., Jogi, Y., & Si, M. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*
- Anastasia Lipursari. 2018. *Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambilan Keputusan*. Jurnal STIE Semarang, VOL 5, NO.1.
- Andriani. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume 5. No. 1. Juni 2010. ISSN: 3687 hal 69-80.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. (2018). <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Darwanis, Abdullah, Yusniar. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh)*. Skipri. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2016. *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Riawan Tjandra, W. 2018. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Universitas Atmajaya: Yogyakarta.
- Hidayatullah, Alfiatu dan Herdjiono Irine. 2014 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke*. Unisbank ISBN 978-979-3649-81-8
- <https://www.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 4 September 2021
- Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara*. *Tax & Accouting Review, Vol. 4, No. 2*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta/
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat
- Pamungkas, B. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading. Vol 12 No.02. Hal : 82-93
- Pedansa, dkk. 2013. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Prediksi, Vol. 11 No. 1, Hal. 18 – 29.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
- Pusdiklatwas BPKP. 2011. *Auditing, Edisi ketiga*, Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- Putra, Levin Anthony. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Senjangan Anggaran*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang:
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Soimah Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Sondang P Siagian, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Suhardjo dan Adhi. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual*. Jurnal STIE Semarang, 3(3).
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Tegor, Juiza, Yusmalina, Fauzan Haqiqi. 2021. *Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun*. Jurnal Cafeteria. Vol 2 No. 1 pp 13-24.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wahid, Ikhsan Abd. 2016. *Pengaruh Motivasi, Etos Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah Kabupaten Morowali*. e Jurnal Katalogi, Vol.4 No.8
- Wiwik Andriani, Irda Rosita dan Hidayatul Ihsan. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. Jurnal-Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang.